

Maba Baru Jalur Mandiri UIN Dikenai Dana Pembangunan

YOGYA (KR) - Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memberikan empati kepada mahasiswa, yakni Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT), Dispensasi Waktu Pembayaran UKT (S1) dan SPP (S2 dan S3), dispensasi waktu pembayaran SPP (S2 dan S3), keringanan UKT bagi S1 dan kuota internet bagi semua mahasiswa. Selain itu, UIN Sunan Kalijaga juga memberikan fasilitas perpustakaan online dan penghapusan syarat TOEFL/TOAFL untuk kelulusan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Phil Sahiron, Minggu (21/6). Kebijakan tersebut juga disampaikan saat Pimpinan UIN mengadakan dialog daring dengan mahasiswa tentang keringanan UKT sebagai dampak pandemi Covid-19 dan Dana Pengembangan Institusi (DPI), Jumat (19/6) lalu.

"Terkait Dana Pembangunan Institusi (DPI) sebesar Rp 1,5 juta tiap mahasiswa baru (Maba) yang diterima di jalur

Mandiri tahun ajaran 2020/2021, hal tersebut diadakan karena UIN Sunan Kalijaga membutuhkan dana yang besar, khususnya untuk peningkatan sarana dan prasarana. Namun, agar tidak memberatkan masyarakat di masa pandemi ini, UIN Sunan Kalijaga memberikan kekeluasaan waktu pembayaran, yakni hingga Semester 6," jelas Sahiron.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof Dr Sutrisno MAg turut menekankan, institusi berkeajiban menjaga kualitas pendidikan meski sedang terdampak pandemi. Oleh karena itu UIN Sunan Kalijaga terus berkomitmen memberikan kemudahan dan akses pada semua mahasiswa.

Untuk menanggapi berbagai pertanyaan dan tuntutan mahasiswa, Sahiron menyatakan, kebijakan pengurangan UKT UIN Sunan Kalijaga sudah sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No 515 tahun 2019. Selain itu, Sahiron juga mengajak mahasiswa untuk memikirkan keberlanjutan institusi. **(Feb)-o**

PENGAMBILAN TOKEN PPDB SMA/SMK Alami Kesulitan, Sekolah Siap Bantu

YOGYA (KR) - Untuk mengantisipasi adanya kerumunan, pengambilan token Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dijadwalkan mulai Senin (22/6) hingga Kamis (25/6) disarankan dari rumah. Meski begitu, sekolah tetap menyiapkan petugas khusus (tim operator) untuk membantu pendaftar yang mengalami kesulitan.

"Di SMA Negeri 8 Yogyakarta sudah menyiapkan tim operator yang akan bertugas memverifikasi kebenaran berkas yang diunggah oleh calon siswa yang akan mengikuti proses PPDB," kata Kepala SMAN 8 Yogyakarta, Rudy Prakanto MEng, Minggu (21/6).

Menurut Rudy, selain

sudah siap memberikan layanan kepada para calon peserta didik baru. SMA Negeri 8 Yogyakarta memberikan layanan informasi dan konsultasi di sekolah bagi yang mengalami kesulitan.

"Selain mewajibkan orangtua dan siswa mengedepankan protokol kesehatan, kami memastikan kelancaran jaringan dan menyiapkan SDM yang berkualitas serta terus mengintensifkan koordinasi dengan Disdikpora DIY," tambah Rudy.

Sementara itu Waka Humas SMAN 3 Yogyakarta Noer Indahyati MPdBl menjelaskan, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada calon peserta didik baru untuk mendapatkan to-

ken, 22-25 Juni, SMAN 3 Yogyakarta telah melakukan persiapan. Bentuknya, menyediakan tujuh operator termasuk personel cadangan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, juga melakukan pelatihan operator PPDB dan simulasi verifikasi data calon peserta didik baru sesuai SOP yang ditetapkan Disdikpora DIY.

Peralatan pendukung sekolah sudah menyiapkan 16 set komputer, support jaringan dan perangkat pendukung lainnya. Pihaknya, juga menyiapkan petugas jaga untuk membantu calon pendaftar yang memerlukan informasi dan kesulitan teknis dalam melakukan pendaftaran secara online. **(Ria/War)-o**

EKONOMI

Bank BPD DIY Penyalur KUR Terbesar

JAKARTA (KR) - Bank BPD DI Yogyakarta masuk dalam 5 besar sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan dana untuk UMKM agar tetap bisa menjalankan perekonomian nasional. Hingga 17 Juni 2020 dengan total outstanding KUR yang disalurkan pemerintah mencapai 50,61 triliun dengan 1,25 juta debitur.

"KUR tersebut disalurkan melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan. Adapun 5 penyalur KUR terbesar yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 29,44 triliun dengan 1,14 juta debitur, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 20,43 triliun dengan 107,6 ribu debitur, BPD Bali sebesar Rp 611 miliar dengan 2.469 debitur, BPD DIY dengan Rp 55 miliar untuk 461 debitur dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 55 miliar dengan 252 debitur," ungkap Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Djoko Hendrato pasca acara 'Dialogue Kita' secara virtual di Jakarta, Jumat (19/6).

Ditambahkan, jumlah UMKM untuk kategori menengah mencapai 60,7 ribu, untuk usaha kecil mencapai 783,13 ribu orang dan usaha mikro mencapai 63,5 juta orang. Menurut Hendrato, 52,5 persen UMKM ini bersifat informal dan umumnya kekurangan layanan finansial, karena porsi kredit UMKM hanya 19,6 persen, dan didominasi bank BUMN, adapun sektor UMKM ini umumnya didominasi sektor perdagangan, dan juga belum mampu menciptakan 'value added' yang tinggi dan juga kesulitan untuk naik kelas dan sulit untuk menembus pasar global dan hanya 6,3 persen yang mampu masuk pasar global dan kontribusi ekspor hanya 14,7 persen. **(Lmg)-o**

Padat Karya Tunai Disiapkan Rp 11,4 T

JAKARTA (KR) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi Covid-19. Tahun 2020, dialokasikan anggaran sebesar Rp 11,4 triliun dengan total penerima manfaat menyerap tenaga kerja sebanyak 613.513 orang.

"Program PKT diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. Hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan anggaran, membantu masyarakat khususnya di perdesaan selama masa sulit ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (19/6).

Dikatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan uang hingga ke desa-desa.

"Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Basuki. **(Lmg)-o**

TEMUAN PERSOALAN PPDB 2020

Server Lambat Jadi Problem Utama

JAKARTA (KR) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan sejumlah temuan masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) 2020 di sejumlah daerah. Masalah pertama yaitu terkait server yang lambat dan sering error.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mencontohkan masalah yang terjadi di Jabar. Lambatnya server membuat pelaksanaan memasukkan data verifikasi PPDB SMA di Cibinong Kabupaten Bogor, terganggu. "Selain itu, sistem jaringan server menjadi lemot juga terjadi di beberapa wilayah, sehingga para pendaftar sangat lama menunggu hasil sukses untuk terbaca di sistem, sangat membu-

tuhkan waktu hingga satu hingga dua jam," kata Retno melalui siaran persnya, Sabtu (20/6).

Lambat dan bermasalahnya server, kata Retno, membuat target verifikasi data pendaftar yang semula direncanakan rampung sebanyak 200 siswa dalam satu hari menjadi tidak tercapai. Masalah ini, juga terjadi dalam PPDB SMA di SumatEra Barat, terutama saat mengirimkan dokumen calon siswa.

"Banyak pendaftar yang menggunakan smartphone Android, sehingga kecepatan unggah sangat bergantung pada paket data yang dimiliki, akibatnya calon siswa dan orangtua harus bersabar dan sering mengulang," paparnya.

Temuan masalah berikutnya yakni kuota berlebih dan kekurangan siswa. Misalnya, di wilayah Kendal Jateng, Retno memaparkan, ada delapan desa yang disepa-

kati masuk dalam zona SMPN 3 Patebon. Tiga desa di antaranya yaitu Desa Jambearum, Purwokerto dan Bugangin, masuk dalam zona utama. Sedangkan lima desa lainnya, adalah zona irisan dari zona lain.

Akibatnya, SMPN 3 Patebon kekurangan siswa, dari kuota 256 siswa baru terisi 167 siswa. Sebab, siswa yang sekolah di SMPN mayoritas berasal dari luar zona. Ada yang dari Kaliwungu, Brangsong dan Weleri. Namun, kuota siswa yang diterima di SMPN 2 Kendal justru kelebihan, dari kuota 256 siswa. **(Ati)-o**

WISUDA SD MUTUAL KOTA MAGELANG

Dilakukan Selama Satu Minggu



KR-M Thoha

Ketua PDM Kota Magelang di forum Wisuda Siswa SD Mutual Kota Magelang.

MAGELANG (KR) - Kota Magelang saat ini menghadapi problematika pendidikan yang tidak ringan. Kalau tidak ada kreativitas dan inovasi, dikhawatirkan kemampuan daya saing atau *competitiveness* yang sudah diperoleh selama beberapa tahun lalu akan terlindas dengan wilayah-wilayah sekitar.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Drs Kartono MPd di forum Wisuda Purna Siswa SD Muhammadiyah 1 Alternatif (Mutual) Kota Magelang Angkatan 14 di Kampus SD Mutual Kota Magelang, Minggu (21/6). Dalam wisuda ini siswa tidak mengikuti acara di sekolah, tetapi mengikutinya secara daring atau online di rumah masing-masing. Ketua Pimpinan Dae-

dikah Jateng, lanjutnya, dilihat peta kualitas dan peta integritas pendidikan Kota Magelang. "Kalau hal ini tidak konsisten terus dijaga, ini terus terlindas dengan waktu," katanya.

Kartono mengatakan Kota Magelang harus perhatian pada 2 hal, yaitu kelembagaan dan akademis. Penataan kelembaga-

an bicara tentang SD, SMP yang ada di Kota Magelang, dan itu harus ditata," kata Kartono.

Kepala SD Mutual Kota Magelang Luqman Novianto mengatakan, kelulusan siswa SD Mutual Kota Magelang dan Angkatan 14 ini meraih predikat lulus 100 persen. Pantauan tim SD Mutual Kota Magelang, seluruh siswa lulusan SD Mutual Kota Magelang sudah mendapatkan sekolah.

Acara wisuda purna siswa SD Mutual baru tahun ini dilaksanakan selama satu minggu, mengingat prosesnya dimulai 15 Juni dan tanggal-tanggal berikut siswa didatangkan untuk mengikuti prosesi pengukuhan dan pemin-dahan cucur yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. **(Tha)-o**

PHRI BERHARAP DESTINASI WISATA IKUT DIBUKA

Juli, 100 Hotel dan Restoran di DIY Beroperasi Lagi

YOGYA (KR) - Setidaknya 100 hotel dan restoran anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY yang telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap beroperasi pada Juli 2020. PHRI DIY berharap beroperasinya hotel dan restoran tersebut dibarengi dengan dibukanya destinasi wisata yang telah benar-benar siap supaya dapat membantu meningkatkan okupansi perhotelan yang berada di kisaran 0 hingga 25 persen saat ini.

Ketua BPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengaku telah lebih siap memberlakukan SOP yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebanyak 60-an hotel dan restoran dari total 400-an anggota PHRI DIY

telah beroperasi hingga Juni 2020. Kemudian setidaknya 35 hingga 40 hotel dan restoran yang sudah siap akan menyusul kembali dibuka pada Juli 2020.

"Kondisi perhotelan di DIY saat ini beraneka ragam, ada yang kuat, se-

tengah kuat dan ada yang sekarat. Makanya sekarang banyak hotel mulai beroperasi karena kekuatan keuangannya hanya mampu bertahan sampai Juni 2020 ini. Bahkan ada yang buka Maret 2020 tetapi tidak laku, jadi kita

butuh intervensi pemerintah seperti peminjaman modal awal, promosi dan sebagainya," tegas Deddy kepada KR di Yogyakarta, Minggu (21/6).

Masih sedikitnya hotel dan restoran di DIY yang belum beroperasi, khususnya hotel non bintang tersebut karena terkendala aliran kas atau cash flow untuk kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan guna memenuhi protokol kesehatan. Kekuatan keuangan inilah yang menjadi problematika hotel maupun restoran di DIY yang belum beroperasi saat ini. Sebab dibutuhkan kucuran anggaran yang

tidak sedikit untuk membangun infrastruktur maupun fasilitas yang mendukung protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tersebut.

"Butuh dana yang tidak sedikit untuk kesiapan infrastruktur dan sarpras protokol kesehatan itu. Jadi baru sekitar 60-an hotel dan restoran dari 400-an anggota PHRI DIY yang buka saat ini. Lalu ada 35 hingga 40-an hotel dan restoran kembali dibuka bulan depan yang telah siap protokol kesehatan maupun infrastrukturnya agar tidak menjadi klaster baru kasus virus Korona di DIY," tandasnya. **(Ira)-o**

PHRI Jaga Citra Pariwisata DIY

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 melumpuhkan pariwisata berbagai daerah termasuk DIY. Namun semangat menjaga imej positif pariwisata DIY terus dinyalakan dengan selalu menimba makna kearifan lokal yakni 'Guyub Sesarengan'. Hal ini yang dilakukan Pengurus BPD PHRI DIY dengan terus mengeber kegiatan bersama menjaga citra pariwisata DIY "Sejak Covid-19 merebak Maret 2020, kita bersama menggelar kegiatan seperti Motorcycle Touring di Bantul, Fun Bike di Sleman, Kampanye From Jogja With Love, dan lain-lain. Patut disyukuri bersama, citra pariwisata DIY masih terjaga dengan baik. Banyak orang dari luar DIY, Jawa bahkan luar negeri sudah kangen berkunjung ke Yogya," tutur Sekretaris BPD PHRI DIY Herman Tony, Minggu (21/6).

Herman menyebutkan, Rapat Pengurus BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY di Rich Jogja Hotel, Jumat (19/6) berlangsung penuh dinamika dan menjadi rapat pertama pengurus setelah Covid-19 merebak di tanah air sejak medio Maret 2020. "Menyengkirkan ego sektoral apalagi ego personal. Semangat inilah yang melandasi berbagai kegiatan pengurus PHRI DIY," tegasnya.

Dikatakan, anggota PHRI DIY kini mulai sibuk melakukan persiapan memasuki era normal baru yang berarti bersedia hidup berdampingan dengan Covid-19. "Tiap-tiap usaha hotel dan restoran anggota PHRI DIY telah dibekali Panduan Umum Normal Baru Hotel dan Restoran Dalam Pencegahan Covid-19 yang dibuat BPP PHRI dan telah didarkan ke seluruh BPD PHRI di Indonesia," jelasnya.

Herman juga *meuwanti-wanti* agar tetap diperlukan kewaspadaan dalam menjalankan operasional hotel dan restoran di era normal baru karena pandemi Covid-19 belum selesai tuntas di seluruh dunia termasuk DIY. **(R-4)-o**



KR-Istimewa

Konter pengiriman barang kerja sama ShopeePay dengan JNE

lewat pembayaran dengan transaksi tunai.

"Pengguna ShopeePay kini dapat memanfaatkan keefektivitasan pengiriman barang dengan adanya kerja sama ini. Tidak hanya terjamin barang akan sampai ke tempat tujuan dengan aman. Pengguna dapat menikmati promo menguntungkan yang ditawarkan yaitu cashback 60 persen sampai dengan Rp 20.000 yang tersedia sampai September 2020 jika menggunakan opsi pembayaran transaksi

pengiriman barang di outlet offline JNE secara non-tunai melalui ShopeePay," papar Handhika di Jakarta, Minggu (21/6).

Sementara Presiden Direktur JNE M Feriadi mengharapkan dengan mudahnya metode transaksi pembayaran nontunai melalui ShopeePay saat transaksi pembayaran atas pengiriman barang di outlet offline JNE, dapat memperbesar kesempatan untuk dapat mengirimkan barang dengan ruang gerak lebih luas lagi. **(Ira)-o**